

TESIS



Oleh :

Agil Mahmud

Q100020002

MAGISTER MANAJEMEN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wacana tentang pendidikan dalam kehidupan umat manusia tak dapat diragukan lagi esensinya. Urgensi pendidikan bagi manusia dilandasi oleh hakekat manusia dengan ciri khas yang prinsipil dan membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lain. Socrates menyebut manusia sebagai *zoon politicon* (hewan yang bermasyarakat), Max Scheller menggambarkan manusia sebagai *das kranke tier*, hewan yang sakit (Driyarkara dalam Umar Tirtaraharja dan La Sula, 2000 : 3) yang selalu gelisah dan takut. Dalam term yang lain, sering pula dianalogkan manusia dengan *animal educated*, *animal symbolicum* atau yang paling masyhur adalah *homo sapiensis* (*hayawanun naatiq*), yaitu makhluk hidup yang dapat berpikir. Ciri khas-ciri khas manusia inilah yang menuntut untuk diaktualkan lewat sebuah proses sadar, yaitu pendidikan untuk mencapai cita-cita induk yang sering diistilahkan dengan memanusiaikan manusia (*insan kamil*).

Garner (dalam Semiawan, 1999 : 77) mengemukakan bahwa manusia mempunyai intelegensi jamak (*multiple intelligence*) untuk mengatasi berbagai masalah. Manusia (Sufyarma, 2003 : 43) memiliki potensi kemampuan tiada terhingga untuk belajar (*unlimited capacity to learn*) dan intelegensi tersebut berfungsi sangat kontekstual. Kemampuan tiada terhingga itu ditandai dengan adanya intelegensi linguistik, logis matematik, visual

spatial, musikal, kinestesis, interpersonal sosial, intrapersonal dan natural (Garner dalam Bobbi De Porter dan Mike Hernacki, 1999 : 31). Multiple intelegence yang dimiliki oleh manusia dipengaruhi oleh keberadaan otak kanan dan otak kiri dengan fungsinya masing-masing.

Sementara Goleman (dalam Sufyarna, 2003 : 44) mengemukakan konsep tentang kreativitas, intelegensi emosional dan sosial. Di mana pada hakekatnya akal manusia itu dibagi menjadi dua jenis kehidupan mental, yaitu adanya aspek rasio yang bersumber dari kepala (*head*) yang diukur oleh IQ dan adanya aspek emosi yang bersumber dari hati sanubari (*heart*) yang diukur dengan EQ. Sedangkan Ary Gunawan (2000 : 118) mengungkapkan konsep manusia seutuhnya berdasarkan sistem nilai dan psikologi sosial budaya bangsa Indonesia yang mencakup :

1. Keutuhan potensi subyek manusia sebagai subyek pengembang yang meliputi potensi jasmaniah, pikir, rasa, karsa, cipta, karya dan budi nurani.
2. Keutuhan wawasan manusia sebagai subyek yang sadar nilai.

Dengan merujuk pada potensi-potensi dasar pada diri manusia, maka tujuan pendidikan harus disusun sedemikian rupa agar mampu mengaktualisasikan potensi-potensi sumber daya insani tersebut. Apalagi tingkat perkembangan manusia sebagai subyek didik bersifat *multifaset*, yaitu pertama fase biologik fisiologik, kedua psikologik, ketiga sosiologik organisasi, implisit psikologi sosial, politik dan ekonomi serta fase keempat integratif human (Noeng Muhajir, 2000 : 25).

Semua prakondisi tersebut mendorong banyak ahli untuk mendekatinya secara psikologis, maka lahirlah aliran-aliran psikologi, seperti behaviorisme, psikoanalisa dan psikologi humanistik. Akan tetapi, upaya-upaya yang dilakukan untuk memahami potensi-potensi manusia dan perkembangannya tidak hanya melihat diri (individu) manusia sebagai entitas *psiko biologi* semata. Namun, diri (individu) manusia harus dipandang juga sebagai makhluk berbudaya (*sosiologis*) sekaligus diri (individu) *teistik*.

Dengan mengandaikan semua keutuhan diri (individu) manusia, maka menjadi tugas pendidikan untuk mengaktualkannya. Menurut Noeng Muhajir (2000 : 21), tujuan pendidikan mengarah pada teori-teori, seperti *unfoldment theory*, *formal discipline theory* dan *preparation theory*. Dengan *unfolment theory* tugas pendidikan adalah membuka atau mengeluarkan potensi laten untuk diarahkan pada tujuan tertentu. *Formal discipline theory* menuntut hasil pendidikan berupa terbentuknya kemampuan yang dapat digunakan untuk mengerjakan hal-hal penting apapun. Sedangkan *preparation theory* menuntut fungsi pendidikan untuk mempersiapkan subyek didik agar dapat melaksanakan tugas secara sempurna.

Mukhtar Bukhori (2001 : 50) mengungkapkan bahwa pendidikan berfungsi menyiapkan para siswa untuk menghadapi tugas kehidupan (*to make a living*), untuk mengembangkan kehidupan yang bermakna (*to lead a meaningful life*) dan untuk turut memuliakan kehidupan (*to ennoble life*). Muji Soetrisno (1995 : 29) menyatakan : pendidikan memiliki tugas sejarah dan

kultural, yaitu menguak tabir situasi dehumanis dan mengubahnya menjadi situasi humanis yang memerdekakan manusia.

Sedangkan Wardiman Joyonegoro (dalam Dikbud, 1996 : 15) mengemukakan tiga fungsi dasar pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan masyarakat, menyiapkan tenaga kerja terdidik, terampil dan terdidik serta penguasaan iptek. Dan Tilaar (dalam Analisis CSIS, 2001 : 272) mengungkapkan bahwa pendidikan memiliki fungsi ganda, yaitu membina kemanusiaan (*human being*) dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia (*human resources*).

Tujuan, tugas, fungsi dan peran yang dikemukakan tersebut sangat sinergis dengan konsep pendidikan yang dikemas dalam UU SPN No. 20/2003. Pada Bab II pasal 3 dinyatakan bahwa :

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Sadar akan kebermaknaan pendidikan dalam memberdayakan sumber daya insani yang seutuhnya, memaksa manusia untuk merencanakan, dan melaksanakan atau menyusun sistem pendidikan yang pada tataran praxisnya adalah mengupayakan pencapaian *cognitif domain*, *afektif domain* dan *psicomotor domain*. Pencapaian domain-domain tersebut kemudian dibebankan kepada sebuah institusi yang bernama *sekolah* yang ternyata tidak

mampu untuk mengemban tugas dalam mewujudkan cita-cita sekunder tersebut, apalagi mewujudkan cita-cita induk.

Ketidak-sesuaian antara *das sein* dan *das sollen* yang terjadi pada amanat yang diemban oleh institusi sekolah membuat banyak pemerhati pendidikan yang menggugat entitas lembaga tersebut. Gugatan tersebut ditujukan bukan saja pada pencapaian tataran praxis pendidikan, namun juga terhadap pemikiran-pemikiran yang dikemukakan, yang baru di kepala saja atau baru pada tataran konsep penyimpangan sudah terjadi. Toffler (dalam Umar Tirtaraharja dan La Sula, 2000 : 59), misalnya menganalogkan sekolah sebagai sebuah pabrik yang menerima *raw in put*, melakukan proses dan menghasilkan *out put*. Implikasinya adalah penyimpangan itu sendiri, yang pada level mikro mereduksi dan mendistorsi dimensi humanitas yang melekat pada manusia dan pendidikan.

Padahal dalam konsep *tri pusat pendidikan*, pendidikan berlangsung pada tiga institusi, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya ada sinergi antara ketiga institusi tersebut dalam mencapai tujuan-tujuan praxis pendidikan. Dengan demikian, persoalan pendidikan menuntut sebuah upaya untuk menjembatani semua komponen mulai dari supra sistem, sistem dan sub sistem pendidikan. Selama ini sistem pendidikan bersifat sentralistik dan terdapat kesenjangan (*disparitas*) antara pendidikan persekolahan baik yang dikelola oleh pemerintah maupun sekolah-sekolah milik swasta, dengan pendidikan non persekolahan, yaitu pendidikan nonformal dan informal. Secara struktural pemerintah hanya mengakui

pendidikan informal di dalam kamus. Anehnya lagi, secara kultural masyarakat dan keluarga tidak tersadarkan dengan keberadaannya sebagai institusi yang mampu menghitam-putihkan pendidikan.

Oleh karena itu, sejatinya semua jenis pendidikan baik pendidikan persekolahan yang bersifat formal dan pendidikan luar sekolah yang bersifat nonformal maupun informal, harus ditata dalam sebuah sistem yang terpadu. Pendidikan non persekolahan yang terdapat di dalam masyarakat dan keluarga sudah sepantasnya diakomodasi agar tujuan mulia dan sakral yang diemban oleh pendidikan dapat diwujudkan. Untuk menjawab persoalan tersebut, dewasa ini telah dikembangkan sistem pendidikan yang lebih aspiratif dan akomodatif, yaitu pendidikan berbasis masyarakat yang berpayung pada *euphoria desentralisasi* dengan mengacu pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Perubahan paradigma menuju pendidikan yang berbasis masyarakat merupakan sebuah konsekuensi logis dari *shifting of paradigm* terhadap semua level perencanaan dan kebijakan pendidikan makro, meso dan mikro. *Shifting of paradigm* merupakan pilihan yang harus dilakukan untuk menguak dan membongkar *vested interest status quo* yang menjadikan pendidikan sebagai kendaraan politik yang tidak memanusiakan. Sementara pada level persekolahan di mana proses pendidikan berlangsung muncul pemaknaan yang kontradiktif dengan filosofi pendidikan yang dianut dan *vis a vis* dengan kondisi sosio kultural masyarakat.

Perubahan paradigma sistem pendidikan yang berbasis masyarakat diarahkan juga sebagai perwujudan pendidikan berbasis luas (*broad based education*). Pendidikan berbasis luas memperhatikan karakteristik dan keunikan kelompok, agama dan etnis sekaligus mencegah terjadinya reduksi terhadap makna belajar yang hanya dipersepsikan dengan sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa peran serta aktif masyarakat dalam pendidikan non persekolahan atau pendidikan nonformal dan informal merupakan keniscayaan karena *quo vadis* pendidikan yang tinggi dan mulia sangat *absurd*, bila diserahkan sepenuhnya kepada sekolah atau kepada pemerintah.

Maka, dengan paradigma pendidikan berbasis masyarakat, sebagaimana tertuang dalam pasal 55 UU SPN No. 20/2003 diharapkan upaya-upaya untuk memberdayakan sumber daya insani yang dicita-citakan dapat diwujudkan.

Rangkuman pasal 55 tersebut berbunyi :

- 1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- 2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- 3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- 5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam kaitannya dengan persoalan tersebut, maka penulis memilih dan akan melakukan penelitian di *Islam, Ilmu, Teknologi dan Seni (ISITEKS)*, Imogiri Bantul DIY. Di mana proses pendidikan nonformal yang berlangsung di institusi tersebut merupakan sebuah fenomena pendidikan berbasis masyarakat yang layak diangkat ke permukaan.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengidentifikasi konteks dan fenomena pendidikan berbasis masyarakat di Isiteks, maka pertanyaan penelitian yang dapat dikedepankan sebagai fokus permasalahan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana kesiapan pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat di Isiteks?
2. Bagaimana implementasi manajemen pendidikan berbasis masyarakat di Isiteks?
3. Bagaimana tujuan pendidikan berbasis masyarakat dalam pemberdayaan sumber daya insani di Isiteks?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disusun, maka penelitian ini tentu saja mengarah pada tujuan-tujuan yang memperjelas arah penelitian sehingga dapat dipertanggung-jawabkan secara keilmuan. Tujuan-tujuan tersebut adalah :

1. Mendeskripsikan komponen-komponen yang harus disiapkan sebelum pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat di Isiteks dalam pemberdayaan sumber daya insani.

2. Menggambarkan tahapan-tahapan proses implementasi manajemen pendidikan berbasis masyarakat di Isiteks dalam pemberdayaan sumber daya insani.
3. Mengungkapkan hasil atau tujuan pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat di Isiteks dalam pemberdayaan sumber daya insani.

D. Manfaat Penelitian

Mengangkat konteks dan fenomena pendidikan berbasis masyarakat di Isiteks dalam penelitian ini dengan tujuan yang jelas akan memberikan manfaat, baik berupa manfaat teoretis dan praktis. Manfaat-manfaat tersebut, adalah :

1. Manfaat teoretis

Melalui penelitian ini, komponen-komponen teoretis yang berhubungan dengan persiapan dalam mengimplementasikan pendidikan berbasis masyarakat di Isiteks dapat diidentifikasi. Demikian pula, tahapan-tahapan dalam proses implementasi, tingkat keberhasilan termasuk kondisi konteks yang mendukung pendidikan berbasis masyarakat. Dan pada akhirnya, manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wacana ilmiah tentang pendidikan berbasis masyarakat yang merupakan sebuah paradigma baru dalam memberdayakan sumber daya insani.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dapat mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan, di mana peneliti mengidentifikasi dan mendeskripsikan kelebihan termasuk hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam proses implementasi pendidikan berbasis masyarakat. Sehingga bagi pengelola Isiteks dan lembaga pendidikan nonformal lainnya dapat dijadikan referensi dalam menerapkan, mengelola dan mengembangkan konsep-konsep pendidikan berbasis masyarakat.